

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2016-2020

K. Agvin Oka Subaja
NPP. 29.1452

*Asdaf Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah
Program Studi Keuangan Publik*

Email: komangagvin@gmail.com

ABSTRACT

Problem statement/background GAP : Implementation of local government financial performance is how the government is able to maximize regional revenue sources and is effective and efficient in using regional revenue and expenditure budgets. Based on the contribution of Poso Regency's Original Regional Revenue in 2016-2020 it is very low, only under 10% of the total realized regional income. So it can be said that the local government has not been able to optimize efforts in exploring regional potential sources. **Purpose :** to analyze the financial performance of the Poso district government for the 2016-2020 fiscal year, the inhibiting factors for the local government's financial performance and efforts to improve the financial performance of the Poso district government. **Method :** is a qualitative-descriptive approach and data collection using a descriptive-inductive approach. This study uses the theory of financial ratio analysis by Mahmudi which consists of the ratio of the degree of fiscal decentralization, the ratio of regional financial independence, the effectiveness ratio and the efficiency ratio of Regional Original Revenue. **Results :** of this study show that the ratio analysis of the degree of fiscal decentralization is 7.35% in the very poor category, the ratio analysis of regional financial independence is 9.40% in the Very Low category, the effectiveness ratio of 109.11% of Regional Original Revenue is categorized as very Effective, the efficiency ratio is 98, 99% is in the Less Efficient category. From the results of this study, Poso Regency is classified as low in supporting the implementation of regional autonomy but has increased every year. The inhibiting factors are the low competence of employees, the lack of Effectiveness and efficiency of Regional Original Revenue and the quality of public services is still low. In overcoming the problem of the realization of the researcher, the local government can optimize tax revenues and increase the realization of the previously budgeted budget and place employees according to their competencies.

Keywords : Analysis, Financial Performance, Financial Ratio Analysis

ABSTRAK

Permasalahan/Latar belakang (GAP) : Implementasi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu bagaimana pemerintah mampu memaksimalkan sumber penerimaan daerah serta efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan persentase kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Poso tahun 2016-2020 sangat rendah yaitu hanya dibawah 10% dari total realisasi pendapatan daerahnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah daerah belum mampu untuk mengoptimalkan upaya dalam menggali sumber potensi daerah. **Tujuan :** untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah daerah kabupaten Poso tahun anggaran 2016- 2020. **Metode :** kualitatif-deskriptif dan pengumpulan data menggunakan metode deskriptif-induktif. Penelitian ini menggunakan teori analisis rasio keuangan oleh Mahmudi yang terdiri atas rasio derajat

desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah. **Hasil/temuan** : menunjukkan analisis rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 7,35% dalam kategori sangat kurang, analisis rasio kemandirian keuangan daerah 9,40% dalam kategori Rendah Sekali, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah 109,11% dikategorikan sangat Efektif, rasio efisiensi 98,99% dalam kategori Kurang Efisien, Dari hasil penelitian ini, di Kabupaten Poso tergolong masih rendah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah namun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam mengatasi permasalahan tersebut saran peneliti adalah pemerintah daerah dapat mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak dan meningkatkan realisasi anggaran yang dianggarkan sebelumnya serta menempatkan pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki.

Kata kunci : Analisis, Kinerja Keuangan, Analisis Rasio Keuangan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendelegasian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memberikan kewenangan daerah untuk mengelola sendiri keuangan daerahnya. Momentum dikeluarkannya produk kebijakan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah memberikan dampak kedaulatan yang signifikan kepada daerah dalam mengelola keuangannya. Implementasi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu bagaimana pemerintah mampu memaksimalkan sumber penerimaan daerah serta efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran dan belanja daerah. Pendapatan daerah dapat bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pemerintah daerah dapat menggali potensi daerah serta memaksimalkan sektor pajak dalam berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karenanya, seharusnya pendapatan asli daerah dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan daerah di Kabupaten Poso. Berikut tabel yang menunjukkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Poso :

Tabel 1.1
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah
Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi PAD (%)
2016	1.288.334.720.238,00	73.133.891.224,00	5,7 %
2017	1.287.408.975.643,00	110.337.795.303,00	8,6 %
2018	1.308.174.613.016,00	94.146.870.936,00	7,2 %
2019	1.353.957.378.379,00	101.241.873.088,00	7,5 %
2020	1.483.154.275.908,00	111.079.727.051,00	7,5 %

Sumber : [djpk kemenkeu APBD](#) (Data diolah oleh Penulis, 2021)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa besaran persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso tahun 2016-2020 sangat rendah yaitu hanya dibawah 10% dari total realisasi pendapatan daerahnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah daerah belum mampu untuk mengoptimalkan upaya dalam menggali sumber potensi daerah dan masih kurangnya kapasitas

sumber daya manusia dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber potensi daerah tersebut selama 5 (lima) tahun anggaran tersebut.

Kontribusi yang masih rendah pada pendapatan asli daerah Kabupaten Poso dapat dilihat pada berbagai sumber pendapatan asli daerah, melalui tabel berikut :

Tabel 1.1
Realisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso
Tahun 2016-2020 (dalam rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	Total PAD (Rp)
2016	12.327.334.782,00	7.333.944.126,00	3.320.638.254,00	50.151.974.062,00	73.133.891.224,00
2017	14.823.015.275,00	7.436.636.760,00	2.770.189.208,00	85.307.954.060,00	110.337.795.303,00
2018	19.203.921.305,00	8.697.897.160,00	2.419.088.762,00	63.825.963.709,00	94.146.870.936,00
2019	19.641.775.322,00	9.760.036.222,00	2.401.727.224,00	69.438.334.320,00	101.241.873.088,00
2020	18.600.000.000,00	4.680.000.000,00	2.390.000.000,00	68.300.000.000,00	111.079.727.051,00

Sumber : djpk kemenkeu APBD (Data diolah oleh Penulis, 2021)

Berdasarkan tabel 1.2 yang ada di atas menunjukkan bahwa rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah dapat dilihat melalui sumber pendapatan asli daerah yang ada. Pada dasarnya setiap sumber PAD sudah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun pada tahun anggaran 2020 seluruhnya mengalami penurunan, akibat adanya pandemi covid-19. Padahal, jika dilihat dari sisi potensi sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso khususnya pada penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat memberikan peluang yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan yang terjadi, yang menjadi poinnya adalah kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Poso belum mampu menyeimbangi bahkan menyaingi kontribusi dana transfer terhadap total Pendapatan Daerah di Kabupaten Poso. Berdasarkan kondisi tersebut dapat diartikan bahwa Kabupaten Poso cenderung masih bergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sehingga mendorong pemerintah untuk lebih giat dalam pelaksanaan kinerja keuangan. Analisis terhadap kinerja keuangan daerah sangat perlu dilaksanakan agar dapat mengetahui penggunaan anggaran yang tidak efektif, pengelolaan sumber daya yang belum optimal, serta untuk menjadi acuan sebagai perbaikan dalam membuat rancangan APBD tahun selanjutnya guna mendukung peningkatan kemandirian daerah, menekan angka ketergantungan, serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian di lingkup pemerintah Kabupaten Poso. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas perlu adanya pemecahan masalah agar kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti tentang kinerja keuangan pemerintah dengan judul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2016-2020”.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu tentang kinerja keuangan menggunakan berbagai jenis rasio. Penelitian Sulistyono berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Sulistyono, A., 2018) yang menggunakan metode penelitian *Mix methods* dengan teori dari Halim yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio kemampuan keuangan daerah, dan rasio efektivitas PAD. Penelitian ini menunjukkan hasil yang baik terhadap kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian Kisman Lantang yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso menemukan bahwa Hasil analisis dari kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Poso menunjukkan hasil yang kurang baik. Rasio Desentralisasi Fiskal dan Rasio Kemandirian daerah belum efektif. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif- kualitatif dengan teori dari Halim yang terdiri dari rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi PAD (Kisman Lantang, 2018). Penelitian Halkadri Fitra, Febri Mukhlis, & Sintia Rama Dani yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran Studi Kasus Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya menemukan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Sijunjung dan Dharmasraya masih sangat kurang baik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif – kuantitatif menggunakan teori dari Mahmudi yang terdiri dari rasio efektifitas total pendapatan rasio efektifitas pendapatan asli daerah, rasio realisasi belanja operasi terhadap realisasi total belanja, rasio realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja, rasio efisiensi total belanja, rasio kemandirian keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah. (Halkadri Fitra, Febri Mukhlis, & Sintia Rama Dani, 2020).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Penulis menggunakan konsep teori rasio keuangan yang dikemukakan oleh Mahmudi (2016) yang terdiri dari rasio desentralisasi derajat fiskal, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perbedaan lainnya adalah penulis fokus kepada pengelolaan APBD pada Pemerintah daerah kabupaten poso tahun anggaran 2016-2020.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja keuangan dari Pemerintah daerah kabupaten Poso tahun anggaran 2016- 2020 dan faktor yang menjadi penghambat serta upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan metode dalam pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti untuk memperoleh data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data Primer, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso, Kepala Subbagian Perencanaan Program BKAD Kabupaten Poso, Kepala Bidang Anggaran dan Perencanaan BKAD Kabupaten Poso, Kepala Bidang Akutansi Keuangan Daerah BKAD Kabupaten Poso, dan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas BKAD Kabupaten Poso. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2016-2020, laporan realisasi Anggaran Pendapatan

dan Belanja tahun anggaran 2016-2020, dokumentasi foto kegiatan di lapangan yang berkaitan dengan kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun analisisnya menggunakan teknik model interaktif yang disampaikan oleh Miles & Huberman dalam Sugiyono (2012 : 334). Model yang digunakan terdiri dari 3 komponen analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi/kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan menjelaskan mengenai kinerja keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Poso tahun 2016-2020 dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Mahmudi. Teori tersebut terdiri dari rasio keuangan yaitu terdiri dari rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal menggambarkan kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD yang berguna untuk memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah. Rasio ini menerangkan mengenai derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin meningkat kemampuan pemerintah daerah saat menyelenggarakan desentralisasi. Berdasarkan Rasio Desentralisasi Fiskal bisa diketahui bagaimana pemerintah memaksimalkan PAD menjadi sumber pendapatan terbesar bagi daerah. Rasio derajat desentralisasi menggambarkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam hal ini APBD Kabupaten Poso. Berdasarkan hasil perhitungan, menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi Kabupaten Poso di tahun 2016 sebesar 5,67% dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 8,57% setelah itu terjadi penurunan pada tahun 2018 menjadi 7,19% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 7,47% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 7,88%. Sehingga besar persentase derajat desentralisasi Kabupaten Poso selama 5 tahun anggaran berada pada persentase 7,35%. Jika diukur dengan skala interval, maka berada pada skala 0,00-10,00 dan diartikan bahwa rasio derajat desentralisasi Kabupaten Poso berada pada skala interval sangat kurang. Hal tersebut disebabkan oleh kontribusi PAD yang sangat kecil dan target yang ditetapkan terhadap PAD yang kecil yang menyebabkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Poso masih sangat kurang dalam meningkatkan penerimaan PAD guna membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

3.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam membiayai segala bentuk kegiatan pemerintahan baik itu pembangunan daerah, pelayanan masyarakat, maupun hal-hal lain yang menjadi urusan pemerintahan daerah. Rasio dihitung dengan membandingkan PAD dengan pendapatan lain yang berasal dari sumber lain, yakni bantuan pemerintah pusat dan provinsi maupun hibah. Rasio Kemandirian Keuangan daerah dapat menunjukkan pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah. Berdasarkan hasil perhitungan, menunjukkan bahwa persentase tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Poso tertinggi ada pada tahun 2017 sebesar 10,80 % dan persentase paling rendah pada tahun 2016 yakni 7,08 %. Sementara pada tahun 2018-2020 persentase kemandirian keuangan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2018 sebesar 9,11 %, tahun 2019 sebesar 9,72 % dan pada tahun 2020 sebesar 10,28% . Hingga pada Hasil perhitungan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Poso berada pada rata-rata 9,40 %, jika diukur dengan skala interval maka berada pada skala 0-25 dan diartikan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Poso berada pada skala interval rendah sekali sehingga menunjukkan adanya pola hubungan instruktif dimana peran pemerintah pusat

dominan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah sedangkan tingkat kontribusi PAD masih sangat rendah sehingga kemandirian daerah tergolong masih sangat rendah. Keadaan tersebut terjadi dikarenakan besar kontribusi PAD lebih kecil apabila dibandingkan dengan kontribusi pendapatan transfer selama tahun 2016-2020. Dimana pendapatan transfer mengalami peningkatan setiap tahunnya serta kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah berada pada angka di atas 90%. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian berdasarkan hal yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Anggaran Kabupaten Poso terkait rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Poso selama lima tahun anggaran, peneliti kemudian menghubungkan hasil persentase rasio kemandirian keuangan dengan peran atau kinerja pemerintah daerah Kabupaten Poso selama lima tahun anggaran dan Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2016-2020 berada pada katagori Rendah untuk tingkat kinerja keuangan dan termasuk pada katagori intruktif untuk ukuran pola hubungan. Tingkat kinerja keuangan rendah dengan pola hubungan instruktif berarti dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan daerah, tingkat kemandirian daerah Kabupaten Poso masih sangat jauh dari kata mandiri. Peran pendapatan eksternal khususnya yang berasal dari pemerintah pusat dalam memberikan bantuan kepada daerah sangat besar.

4.3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperlihatkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan daerah yang dibandingkan dengan target yang ditentukan berdasarkan potensi riil daerah. Apabila rasio efektivitas semakin tinggi, maka menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan yang semakin efektif. Rasio Efektivitas Pengelolaan PAD yang diperoleh dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD terhadap target penerimaan PAD. Berdasarkan hasil perhitungan, menunjukkan bahwa persentase efektivitas pengelolaan PAD Kabupaten Poso berada pada angka 109,11%. Jika dilihat berdasarkan skala interval diartikan bahwa Kabupaten Poso dikategorikan sangat efektif dalam pengelolaan PAD. Pada tahun 2016-2020 kinerja Pemerintah Kabupaten Poso dalam memanfaatkan potensi daerah sebagai sumber-sumber pendapatan asli daerah masih kurang efektif. Sehingga total pendapatan asli daerah belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai hasil penelitian yang ada berdasarkan uraian Subbidang Akutansi BKAD Kabupaten Poso yang dapat disimpulkan bahwa efektivitas ini tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya potensi daerah, melainkan juga dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan oleh sumber daya yang ada.

3.4. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efisiensi digunakan untuk memberikan gambaran kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan untuk belanja daerah berdasarkan total realisasi pendapatan daerah dalam APBD daerah tersebut. Rasio efisiensi sebagai tolak ukur dalam menentukan tingkat efisiensi penggunaan pendapatan daerah dalam membiayai keseluruhan belanja daerah. Dengan menentukan hasil rasio efisiensi keuangan suatu daerah maka akan memperkuat penilaian kinerja keuangan daerah tersebut. Suatu kegiatan oprasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang seminimum mungkin. Rasio Efisiensi PAD dipakai untuk menghitung Rasio Efisiensi Pengelolaan PAD yang diperoleh dengan membandingkan realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan daerah. Hasil analisis rasio efisiensi akan menunjukkan seberapa besar pengeluaran dari pendapatan daerah Kabupaten Poso untuk membiayai seluruh belanja daerah. Semakin besar persentase yang dihasilkan artinya semakin besar anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai belanja daerah maka semakin tidak efektif

keuangan daerah dan begitupun sebaliknya. Perhitungan dan grafik rasio Efisiensi PAD menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan Kabupaten Poso tahun anggaran 2016-2020 mengalami fluktuatif. Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2016-2020 tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Poso termasuk dalam kriteria tidak efisien. Artinya, kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Poso dalam pengelolaan pendapatan daerah untuk membiayai keseluruhan belanja daerah masih tidak efektif karena total belanja daerah melebihi total realisasi pendapatan daerah. Kemudian untuk rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Poso tahun anggaran 2016-2020 dengan persentase sebesar 98,99 % termasuk dalam kriteria “Tidak Efisien”. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso yang kemudian disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan agar belanja daerah tidak melebihi total pendapatan daerah adalah dengan cara memangkas belanja yang sifatnya tidak mendesak, menurunkan target belanja daerah untuk tahun anggaran berikutnya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, dan memfokuskan penggunaan anggaran pendapatan daerah untuk hal-hal yang dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa kontribusi PAD Kabupaten Poso sangat kecil dan target yang ditetapkan terhadap PAD yang kecil menyebabkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Poso masih sangat kurang dalam meningkatkan penerimaan PAD guna membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Tingkat kinerja keuangan daerah Kabupaten Poso masih rendah dengan pola hubungan yang berarti dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan daerah, tingkat kemandirian daerah Kabupaten Poso masih sangat jauh dari kata mandiri. Peran pendapatan eksternal khususnya yang berasal dari pemerintah pusat dalam memberikan bantuan kepada daerah masih sangat besar. Berdasarkan skala interval diartikan bahwa Kabupaten Poso dikategorikan sangat efektif dalam pengelolaan PAD. Pada tahun 2016-2020 kinerja Pemerintah Kabupaten Poso dalam memanfaatkan potensi daerah sebagai sumber-sumber pendapatan asli daerah masih kurang efektif. Sehingga total pendapatan asli daerah belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Perhitungan dan grafik rasio Efisiensi PAD menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan Kabupaten Poso tahun anggaran 2016-2020 mengalami fluktuatif. Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2016-2020 tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Poso termasuk dalam kriteria tidak efisien. Artinya, kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Poso dalam pengelolaan pendapatan daerah untuk membiayai keseluruhan belanja daerah masih tidak efektif karena total belanja daerah melebihi total realisasi pendapatan daerah. Kemudian untuk rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Poso tahun anggaran 2016-2020 dengan persentase sebesar 98,99 % termasuk dalam kriteria “Tidak Efisien”.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa analisis rasio kinerja keuangan daerah Kabupaten Poso tergolong masih rendah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah hal ini ditandai dengan hasil analisis rasio keuangan yang masih rendah dan ditemui berbagai faktor hambatan yaitu Kurangnya kualitas dari pegawai seperti operator yang mampu mengoperasikan aplikasi sistem informasi keuangan yang dapat memudahkan dalam pengelolaan anggaran, Efektifitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini dapat dilihat dari pemerintah daerah yang kurang menggali potensi daerah yang ada serta kelalaian dalam tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan daerah dan Pelayanan Publik, hal ini ditandai dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja maupun pendapatan transfer pada kondisi yang fluktuatif serta kurangnya kepercayaan masyarakat akan kinerja pemerintah sehingga berpengaruh pada tingkat penerimaan daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian juga hanya dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Mahmudi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Poso pada tahun lainnya untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Cresswell. J. W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Djaenuri, Aries. 2014. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Halim, Abdul. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi Kesatu. Jogjakarta : Penerbit UPP AMP YKPN.
- Hamdi, Muchlis and Ismaryati, Siti (2014) *Metodologi Penelitian Administrasi*. In: *Filosofi Penelitian*. Universitas Terbuka, Jakarta, pp. 1-38. ISBN 9789790118898
- Herisistam. 2015. *Determinan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*. Jakarta
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Sinurat, Marja. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metode Penelitian Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta.
- Fitra, H., Mukhlis, F., & Dani, S. R. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran: Studi Kasus Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi (JIPE)*, 10(1), 25. <https://doi.org/10.24036/011084400>
- Kisman Lantang. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. *Ekomen*, 18(2), 20–29. <https://ojs.unsimar.ac.id/index.php/EkoMen/article/view/332>
- Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3, 43–59. <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i1.22>